

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum masyarakat adalah sekumpulan individu-individu atau orang yang hidup bersama, masyarakat disebut “*society*” artinya adalah interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan, berasal dari kata lain *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Dengan kata lain pengertian masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi maupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah secara ekonomi.¹

Menurut Emile Durkheim bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama;
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama;
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan;
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

¹ Donny Prasetyo dan Irwansyah, Memahami Masyarakat dan Perspektifnya: *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 1, Issue 1 (Januari 2020) Dinasti Review, h. 164

Masyarakat sebagai wadah yang paling sempurna bagi kehidupan bersama antar manusia. Hukum adat memandang masyarakat sebagai suatu jenis hidup bersama dimana manusia memandang sesamanya manusia sebagai tujuan bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.² Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adalah suatu perkumpulan manusia yang saling berinteraksi, terikat oleh sistem adat atau kebiasaan bersama, tumbuh dengan sistem hidup bersama.

Dalam perkembangannya, masih terjadi ketimpangan sosial di tengah-tengah masyarakat, dengan kata lain masih banyak masyarakat yang belum bisa terlepas dan beranjak dari jeratan kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu persoalan serius yang harus dihadapi Pemerintah karena persoalan ini telah terdapat sejak dulu. Banyak hal yang menyebabkan kemiskinan, antara lain kurangnya modal, kurangnya ilmu pengetahuan dan keterampilan, kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia, dan lain-lain. Kemiskinan juga termasuk masalah yang berbahaya karena dengan jumlah dan tingkat kemiskinan yang tinggi dapat mengarahkan individu untuk melakukan tindak

² Donny Prasetyo dan Irwansyah, Memahami Masyarakat dan Perspektifnya: *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 1, Issue 1 (Januari 2020) Dinasti Review, h. 164

kejahatan sehingga dengan adanya kejahatan lahir lah suatu masalah baru yang serius.³

Untuk menghindari potensi kejahatan yang dilakukan baik oleh individu atau perkumpulan masyarakat, Pemerintah perlu hadir untuk mencegah hal tersebut terjadi, atau sekurang-kurangnya Pemerintah tetap berupaya untuk meminimalisir hal tersebut agar tidak terjadi di lingkungan masyarakat. Campur tangan Pemerintah sangat besar pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat untuk terus berusaha agar berkembang ke arah yang lebih baik, salah satunya dengan mengaktualisasikan prinsip-prinsip *Good and Clean Government*.

Penyelenggaraan pemerintahan dalam *Good Government* berkaitan dengan isu transparansi, akuntabilitas publik, dan sebagainya. Secara konseptual dapat dipahami bahwa *Good Government* menunjukkan suatu proses yang memposisikan rakyat dapat mengatur ekonominya. Institusi serta sumber sosial dan politiknya tidak hanya sekedar dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan integrasi bagi kesejahteraan rakyat. *Good Government* juga dipahami sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan

³ Muhamad Razi Aswanda, "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terkena Dampak Covid-19 Dalam Perspektif *Maslahah Dharuriyah* (Studi di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)" (Skripsi Program Sarjana, UIN Ar-Raniri, Banda Aceh, 2021) h.1.

dengan prinsip demokrasi dan pemerintahan yang efisien, serta pemerintahan yang bebas dan bersih dari kegiatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).⁴

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program bantuan sosial, salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan finansial secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun efektivitas program ini sangat tergantung pada mekanisme penerapannya yang harus memenuhi prinsip *Good and Clean Government*.⁵

Prinsip *Good and Clean Government* mengacu pada pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Penerapan prinsip ini dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran, tidak terjadi penyalahgunaan, dan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat.⁶

Salah satu cara untuk mengembangkan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Government*) yaitu dengan meningkatkan kualitas

⁴ Nur Rohim Yunus, "Menciptakan *Good and Clean Government* Berbasis Syariah Islamiyah Dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia," *Jurnal El-Islam* Vol. 3 no. 1 (April, 2016) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 148.

⁵ Nur Rohim Yunus, "Menciptakan *Good and Clean Government* Berbasis Syariah Islamiyah Dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia," *Jurnal El-Islam* Vol. 3 no. 1 (April, 2016) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 148.

⁶ Nur Rohim Yunus. "Menciptakan *Good and Clean Government* Berbasis Syariah Islamiyah Dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia," *Jurnal El-Islam* Vol. 3 no. 1 (April, 2016) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 148.

pelayanan dalam pemerintahan setempat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, setiap instansi Pemerintah dapat melakukan pembaharuan dalam setiap penyelenggaraan Pemerintah Daerah sehingga dapat mendukung tercapainya proses *Good and Clean Government* yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.⁷

Sedangkan dalam Islam terdapat teori yang membahas tentang keharusan pemangku jabatan untuk memenuhi kekurangan yang terjadi pada masyarakat. Salah satunya dengan menerapkan pendekatan politik ekonomi Islam. Yang dimaksud dengan politik ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Kewenangan negara untuk mengintervensi aktivitas ekonomi masyarakat merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Intervensi ini tidak sekedar mengadaptasi hukum Islam yang sudah tertera dalam teks-teks dalil, namun mengisi kekosongan hukum yang terjadi dalam hukum Islam.⁸

⁷ Nur Rohim Yunus. "Menciptakan *Good and Clean Government* Berbasis Syariah Islamiyah Dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia," *Jurnal El-Islam* Vol. 3 no. 1 (April, 2016) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 149.

⁸ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah Teori-Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam dan Undang-Undang Sumber Daya Air di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h.13.

Di sisi lain, konsep *Siyasah Maliyah* dalam Islam menawarkan perspektif yang kaya dalam pengelolaan keuangan negara. *Siyasah Maliyah* menekankan pada keadilan, kesejahteraan umum, dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara yang amanah. Penggabungan antara prinsip *Good and Clean Government* dengan *Siyasah Maliyah* dapat memberikan kerangka kerja yang komprehensif dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT).⁹

Namun demikian, penetapan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di lapangan rentan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari masalah data penerima yang tidak akurat, korupsi, hingga kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan mendalam mengenai bagaimana prinsip *Good and Clean Government* dapat diterapkan secara efektif dalam mekanisme penetapan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan mempertimbangkan konsep *Siyasah Maliyah*.¹⁰

Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 4 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sistem ekonomi menunjuk pada

⁹ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam...* h.14.

¹⁰ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam...* h.14.

aturan main yang telah disepakati suatu masyarakat untuk dipakai sebagai pedoman melaksanakan tindakan dan kegiatan ekonomi masyarakat.¹¹

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana *Siyasah Maliyah* dapat memperkuat penerapan prinsip *Good and Clean Government* pada program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang Banten, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada program ini.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk menulis dalam suatu karya ilmiah dengan judul **“Tinjauan *Siyasah Maliyah* Terhadap Pelaksanaan Prinsip *Good and Clean Government* Pada Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Studi di Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang-Banten”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang Banten?

¹¹ Dina Faramida, “Tinjauan Fiqih *Siyasah Maliyah* Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT) Covid-19 (Studi Kasus Desa Wangkelang, Moga, Pemalang),” (Skripsi Gelar Sarjana, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), h. 2.

2. Bagaimana Tinjauan Secara *Siyasah Maliyah* Pada Mekanisme Penetapan Bantuan Langsung Tunai di Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang Banten?
3. Apakah Pada Mekanisme Penetapan Bantuan Langsung Tunai di Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang Banten Sudah Sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Government*?

C. Fokus Penelitian

Untuk memudahkan penelitian ini, peneliti sangat membatasi topik yang akan dibahas dengan maksud agar lebih spesifik dan mendalam, supaya relevan dengan pokok pembahasan yang peneliti maksud yaitu tentang tinjauan secara *Siyasah Maliyah* dan menurut prinsip-prinsip *Good and Clean Government* Pada Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang-Banten. Oleh karena itu, peneliti hanya memfokuskan judul yang akan peneliti tulis yang tertera di atas saja.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan maksud dan tujuan yang telah diuraikan, maka peneliti menyimpulkan beberapa penelitian antara lain:

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang Banten.

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Secara *Siyasah Maliyah* Pada Mekanisme Penetapan Bantuan Langsung Tunai di Desa Purwadadi
3. Untuk Mengetahui Apakah Pada Mekanisme Penetapan Bantuan Langsung Tunai di Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang Banten Sudah Sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Government*.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teori

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman dan penerapan akademis dari teori-teori utama terkait tentang prinsip-prinsip *Good and Clean Government* juga Tinjauan *Siyasah Maliyah* dan pada umumnya sebagai bahan referensi lanjutan untuk penelitian yang akan datang.

2. Secara Praktik

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri juga bagi orang lain dan tujuan utama penelitian ini adalah selain sebagai pengalaman konservasi di lapangan, juga untuk melengkapi syarat yang diperlukan dalam mencapai Gelar S-1 Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Maulana Hasanuddin Banten.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari duplikasi peneliti melakukan beberapa riset atau penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Dari hasil penelusuran peneliti, diperoleh beberapa masalah yang linier dengan masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Skripsi Dina Faramida yang berjudul *Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD) COVID-19*.¹² Skripsi ini bertujuan *pertama*, untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Covid-19 di Desa Wangkelang Tahun Anggaran 2020. *Kedua*, untuk mengetahui apakah pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Covid-19 di Desa Wangkelang sesuai sasaran. *Ketiga*, untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyasah Maliyah* terhadap pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Covid-19 di Desa Wangkelang. Adapun hasil dari penelitian pada skripsi ini disimpulkan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Covid-19 yang diprogramkan oleh Pemerintah dalam rangka mengurangi dampak pandemi virus corona di Desa Wangkelang masih belum

¹² Dina Faramida, “Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT) Covid-19 (Studi Kasus Desa Wangkelang, Moga, Pemalang),” (Skripsi Gelar Sarjana, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021) h. 12.

optimal. Ditinjau dari segi keadilan bantuan ini masih banyak yang tidak tepat sasaran, hanya sekitar 40% warga yang memenuhi kriteria yang disyaratkan bagi penerima bantuan hanya sebagian kecil saja yang memenuhinya. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang *Fiqih Siyasah Maliyah*. Dan perbedaannya terdapat pada pengkajian pengelolaan dana bansos Covid-19 yang lebih spesifik pada Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Wangkelang Kecamatan Moga Kabupaten Malang. Sedangkan peneliti mengkaji tentang program Bantuan Langsung Tunai (BLT) baik sebelum Covid hingga pasca Covid-19 di Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang-Banten.

2. Skripsi Muhammad Arif Pratomo dengan judul *Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara dari Sektor Cukai Pada Tahun 2018*.¹³ Tujuan skripsi ini untuk mengetahui bagaimana objek-objek pajak terkena cukai di Indonesia menurut sudut pandang *Siyasah Maliyah*. Kemudian untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pengelolaan keuangan negara dari sektor cukai tahun 2018 dari sudut pandang *Siyasah Maliyah*. Adapun hasil penelitian ini menjawab bahwa cukai itu merupakan cabang dari akad *dlaman*

¹³ Muhammad Arif Pratomo, “Analisis *Siyasah Maliyah* Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dari Sektor Cukai Pada Tahun 2018,(Skripsi Program Sarjana, IAIN Ponorogo, 2021), h.7.

karena bersifat pertanggungjawaban, artinya cukai itu bukan pajak dan tidak termasuk ke dalam sumber pemasukan negara dalam fikih *Siyasah Maliyah*. Persamaannya ada pada pembahasan *Siyasah Maliyah*. Dan perbedaanya terletak pada objek penelitian dan penelitian yang ditulis oleh Muhammad Arif pratomo lebih terfokus pada undang-undang terkait cukai yang dilakukan dengan pendekatan penelitian berupa penelitian pustaka (*library research*.) Sedangkan yang menjadi fokus penelitian peneliti adalah tentang program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bersifat penelitian lapangan atau kualitatif.

3. Skripsi Susetyo Arif Hidayat yang berjudul Analisis Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good and Clean Government* Dalam Pelayanan Publik (Studi Pada Kantor Kecamatan Semarang Timur).¹⁴ Penelitian ini bertujuan *pertama*, untuk mengetahui penerapan prinsip *good government* dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Semarang Timur. *Kedua*, untuk mengetahui faktor pendukung yang mempengaruhi dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *good government* dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Semarang Timur. *Ketiga*, untuk mengetahui kendala dalam penerapan prinsip-prinsip

¹⁴ Susetyo Arief Hidayat, “Analisis Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good and Clean Government* Dalam Pelayanan Publik (Pada Kantor Kecamatan Semarang Timur),” (Skripsi Gelar Sarjana, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2022) h. 6.

good government dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Semarang. Hasil dari penelitian pengimplementasian prinsip *good government* dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Semarang Timur sudah sesuai dengan standar pelayanan publik, kendala dalam penerapan prinsip-prinsip *good government* dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Semarang Timur terdapat dua faktor, faktor internal kurangnya pemahaman aparatur mengenai prinsip-prinsip *good government* dan fasilitas yang kurang memadai dan kurang disiplinnya aparat saat bekerja dan faktor eksternal kurangnya partisipasi masyarakat.¹⁵ Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang Prinsip-prinsip *Good and Clean Government*, hanya saja terdapat perbedaan dengan objek penelitian dan penelitian yang dilakukan oleh Susetyo Arif Hidayat berlangsung pada masa pandemi, dan bersifat menyeluruh. Sedangkan yang peneliti tekankan adalah aktualisasi prinsip-prinsip *Good and Clean Government* pada program pemerintah Desa yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT), baik sebelum dan sesudah pandemi.

4. Skripsi Mega Selvi dengan judul Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Siklus Pencairan Dana Tunai (BLT) di Desa

¹⁵ Susetyo Arief Hidayat, “Analisis Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good and Clean Government* Dalam Pelayanan Publik (Pada Kantor Kecamatan Semarang Timur),” (Skripsi Gelar Sarjana, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2022), h. 88.

Sukodono Bondowoso.¹⁶ Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengetahui implementasi *good corporate governance* pada pencairan Bantuan Langsung Tunai di Desa Sukodono. Kedua, untuk mengetahui sistem informasi akuntansi dalam proses pencairan dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Sukodono. Adapun hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan prinsip akuntabilitas dan transparansi dimana dalam kedua prinsip ini Desa Sukodono masih dikatakan lemah. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti terkait implementasi *Good Corporate*, hanya saja perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dibahas, pada skripsi yang dibahas oleh Mega Selvia terfokus pada sistem informasi akuntansi yang dituangkan pada program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sukodono. Artinya lebih terfokus kepada keseriusan pengurus Desa yang berupaya untuk seprofesional mungkin dalam menyelenggarakan program tersebut. Sedangkan fokus penelitian peneliti lebih condong kepada kesesuaian penerapan prinsip *good and clean government* pada program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

5. Skripsi Siti Awalussalamah yang berjudul *Tinjauan Siyasaah Maliyah Terhadap Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-*

¹⁶ Mega Selvia, Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Siklus Pencairan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sukodono Bondowoso, (Skripsi Gelar Sarjana, Universitas Negeri Kia Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), h. 8.

DD) di Desa Legok Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang.¹⁷

Tujuan penelitian ini. Pertama, untuk mengetahui penyaluran bantuan Bantuan Langsung Tunai dana Desa BLT-DD) di Desa Legok Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang. Sedangkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bantuan Langsung Tunai dana Desa masih belum tepat sasaran dalam pemilihan penerima program Bantuan Langsung Tunai dana Desa, dikarenakan jumlah keluarga miskin di Desa legok yaitu 311 keluarga miskin tetapi yang mendapat bantuan sejumlah 44 orang saja, dan ada beberapa data warga yang tumpang tindih dengan program sosial pemerintah yang lain langsung tunai dana Desa (BLT-DD) di Desa Legok Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang. Kedua untuk mengetahui tinjauan *siyasah maliyah* terhadap penyalurannya. Pada penelitian ini subyek yang diangkat memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang program bantuan sosial yaitu bantuan langsung tunai tinjauan *siyasah maliyah* yang termasuk kedalam Dana Desa pemerintah. Namun terdapat perbedaan mulai dari objek penelitian, dan substansi yang dibahas. Peneliti mengambil subyek secara umum mengenai program

¹⁷ Siti Awalussalamah, Tinjauan *Siyasah Maliyah* Terhadap Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Legok Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang.(Gelar Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2024), h. 9.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan menyertakan prinsip *good and clean* didalamnya.

G. Kerangka Pemikiran

1. *Siyasah Maliyah*

Siyasah Maliyah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan Islam yang mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.¹⁸

Tujuan syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat dalam dua bidang; dunia dan akhirat. Inilah dasar tegaknya semua syariat Islam, tidak ada satu bidang keyakinan atau aktivitas insan atau sebuah kejadian alam kecuali ada pembahasannya dalam syariat Islam, dikaji dengan segala cara pandang yang luas dan mendalam.¹⁹

Di kalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu Negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang-orang kaya dan orang miskin. Di dalam *siyasah maliyah* dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.²⁰

¹⁸ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, H. 22-24

¹⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, h. 177-178.

²⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, h. 177-178.

Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah* orang-orang kaya disentuh hatinya untuk mampu bersikap dermawan, dan orang-orang miskin diharapkan bersikap selalu sabar (ulet), berusaha, dan berdoa mengharap karunia Allah. Kemudian sebagai wujud dari kebijakan, diatur di dalam bentuk zakat dan infak, yang hukumnya wajib atau juga di dalam bentuk bentuk-bentuk lain seperti wakaf, sedekah, dan penetapan *ulil amri* yang tidak bertentangan dengan *nash* syariah, seperti bea cukai (*usyur*) dan *kharaj*.²¹

Isyarat-isyarat Al-Qur'an dan Hadis Nabi menunjukkan bahwa agama Islam memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada orang fakir dan miskin dan kaum *mustad'afin* (lemah) pada umumnya, kepedulian inilah yang harus menjadi kebijakan Penguasa (*ulil amri*) agar rakyatnya terbebas dari kemiskinan.²²

2. Good and Clean Government

Istilah *good and clean government* merupakan wacana baru dalam kosa kata ilmu politik. Muncul di awal Tahun 1990-an. Istilah ini memiliki pengertian segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik yang bersifat baik (*good*) dan bersih (*clean*). Dalam konteks ini, pengertian

²¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, h. 177-178.

²² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ...*, h. 177-178.

good government tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah (lembaga swadaya masyarakat).²³

Secara bahasa, pengertian *good* berarti baik, dalam istilah pemerintahan mengandung dua pemahaman. Pemahaman pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan dan kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.²⁴ Arti *Good and Clean Government* mengandung dua pengertian. Yaitu pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat yang dalam pencapaian tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial; kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dalam melakukan upaya pencapaian tujuan nasional.²⁵

²³ Kamarudidin Hidayat, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education): Demokrasi, Hak Asasi manusia dan masyarakat Madani, Cet III* (Jakarta: ICCE, 2007), h. 216

²⁴ Sunarya, *Implementasi Good Government dan Clean Governance dalam Peenyelenggaraan Pemerintahan*, (Jakarta: Irjen Depag, 2007), h.72.

²⁵ Nadia Asri, *Good Governace Pengelolaan Dana Desa di Desa Gantarang, Kabupaten Jeneponto*, (Program Gelar Sarjana Universitas Hasanuddin, Makasar, 2021), h.11.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian hanya pada berbasis data dan tidak ada perhitungan di dalamnya kemudian disajikan dalam bentuk naratif. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif, juga dibutuhkan informasi yang akurat serta data yang mendukung penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu: penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dimana menurut Borg and metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi*.²⁶

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2019), h.18.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang. Adapun alasan memilih lokasi ini berawal dari keresahan peneliti mengenai permasalahan yang relevan dengan judul penelitian di daerah tersebut. Sehingga menimbulkan pertanyaan terkait mekanisme penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta tinjauan secara *siyasah maliyah* pada mekanisme penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang Banten.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai *sumber*, dan berbagai *cara*. Bila dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di Rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data

dapat dilakukan dengan cara interview (wawancara), kuisioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya.²⁷ Wawancara merupakan proses pengambilan data yang melibatkan narasumber sebagai sumber informasi disaat melakukan penelitian. Biasanya dilakukan pada lembaga-lembaga pemerintahan, pihak swasta, atau perseorangan. Observasi merupakan proses pengamatan, yang dilakukan oleh peneliti sebagai penunjang gambaran yang terjadi di lapangan. Sedangkan, kuisioner biasanya disajikan dengan instrumen pertanyaan, bisa berbentuk teks baik *softfile*, *hardfile* atau berupa *link* yang disebar kepada narasumber untuk kemudian dikumpulkan sebagai data pada penelitian.

4. Sumber Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang diperlukan untuk melengkapi tujuan penelitian. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data ini diperoleh melalui beberapa tahapan seperti observasi, dokumentasi dan wawancara yang bersifat intensif. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini bertempat di Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang-Banten. Kemudian wawancara dilakukan

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2019), h.194.

dengan melibatkan beberapa kalangan baik secara perseorangan maupun Pemerintahan Desa terkait untuk mendapatkan data yang valid pada tujuan penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Bapak Abdul Aziz selaku pengurus Desa dibidang kepala urusan keuangan, kang Muslim selaku warga Desa Purwadadi, dan Bapak Muntibi selaku Badan Pengurus Desa (BPD) Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang Banten.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang digunakan peneliti untuk menganalisis yang dihasilkan dari beberapa kegiatan seperti membaca, mengamati, memahami dan mengutip. Adapun dalam kata lain dapat diperoleh melalui observasi empiris, serta kajian pustaka, artikel maupun jurnal yang linier dengan tema penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiono dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya penuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif),

sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis.²⁸

I. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini agar mendapatkan tujuan yang diharapkan, maka sistematika penelitian ini akan dibagi dalam bagian-bagian tertentu yang berbentuk bab dan sub bab. Secara garis besar sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Peneliti memaparkan pendahuluan yang menjelaskan pembahasan skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORETIS SECARA SIYASAH MALIYAH TERHADAP PELAKSANAAN PRINSIP *GOOD AND CLEAN GOVERNMENT* PADA MEKANISME PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Landasan teori pada bab ini membahas tentang tinjauan *siyash maliyah* terhadap pelaksanaan prinsip *good and clean government* pada mekanisme penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2019), h. 318-319.

Purwadadi. Yang didalamnya nanti akan diuraikan mengenai pengertian dari masing-masing teori yang disebutkan oleh peneliti.

BAB III : KONDISI OBJEKTIF LOKASI

Peneliti memaparkan gambaran umum Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang-Banten, visi dan misi, kondisi demografis, kondisi ekonomi, kondisi sarana dan prasarana, dan struktur organisasi.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terfokus pada pembahasan dan hasil penelitian terkait tinjauan *siyash maliyah* terhadap prinsip *good and clean* pada mekanisme penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang-Banten.

BAB V : PENUTUP

Penelitian skripsi ini membuat kesimpulan dan saran dari uraian-uraian pada bab, lalu diperoleh berdasarkan penelitian yang diperlukan dalam upaya penyempurnaan penelitian skripsi ini, selanjutnya dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.